

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Temuan Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pasca bencana baik yang berada di pusat yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun yang berada di daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BPBD Kabupaten Nias Utara berlokasi **di Lotu Kabupaten Nias Utara.**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disingkat BPBD Kabupaten Nias Utara adalah salah satu organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara. Dasar pembentukan BPBD Kabupaten Nias Utara berdasar pada:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
2. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Tata Organisasi BPBD Kabupaten/Kota.
3. Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2008 Tentang BPBD/Kota.
4. Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.
5. Perda Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Organisasi Perangkat Daerah.

BPBD Kabupaten Nias Utara memiliki fokus wilayah penanganan seputar Kabupaten Nias Utara. Dengan dedikasi yang tinggi, BPBD siap menjadi garda terdepan dalam menanggulangi bencana daerah dan membantu masyarakat.

4.1.2 Visi dan Misi BPBD Kabupaten Nias Utara

Visi :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN NIAS UTARA YANG TANGGUH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA”

Misi:

- a. Membangun system dasar penanggulangan bencana melalui koordinasi dan kolaborasi antar kelembagaan dan masyarakat;
- b. Membangun budaya pengurangan risiko dan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- c. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat sesuai dengan asas, prinsip dan tujuan penanggulangan bencana;
- d. Membangun sistem penaggulangan bencana secara cepat, tepat, efektif dan akuntabel;
- e. Menyiapkan sarana dan prasarana serta tata kelola logistik dalam penangglangan bencana

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara pada pasal 26, sebagai berikut:

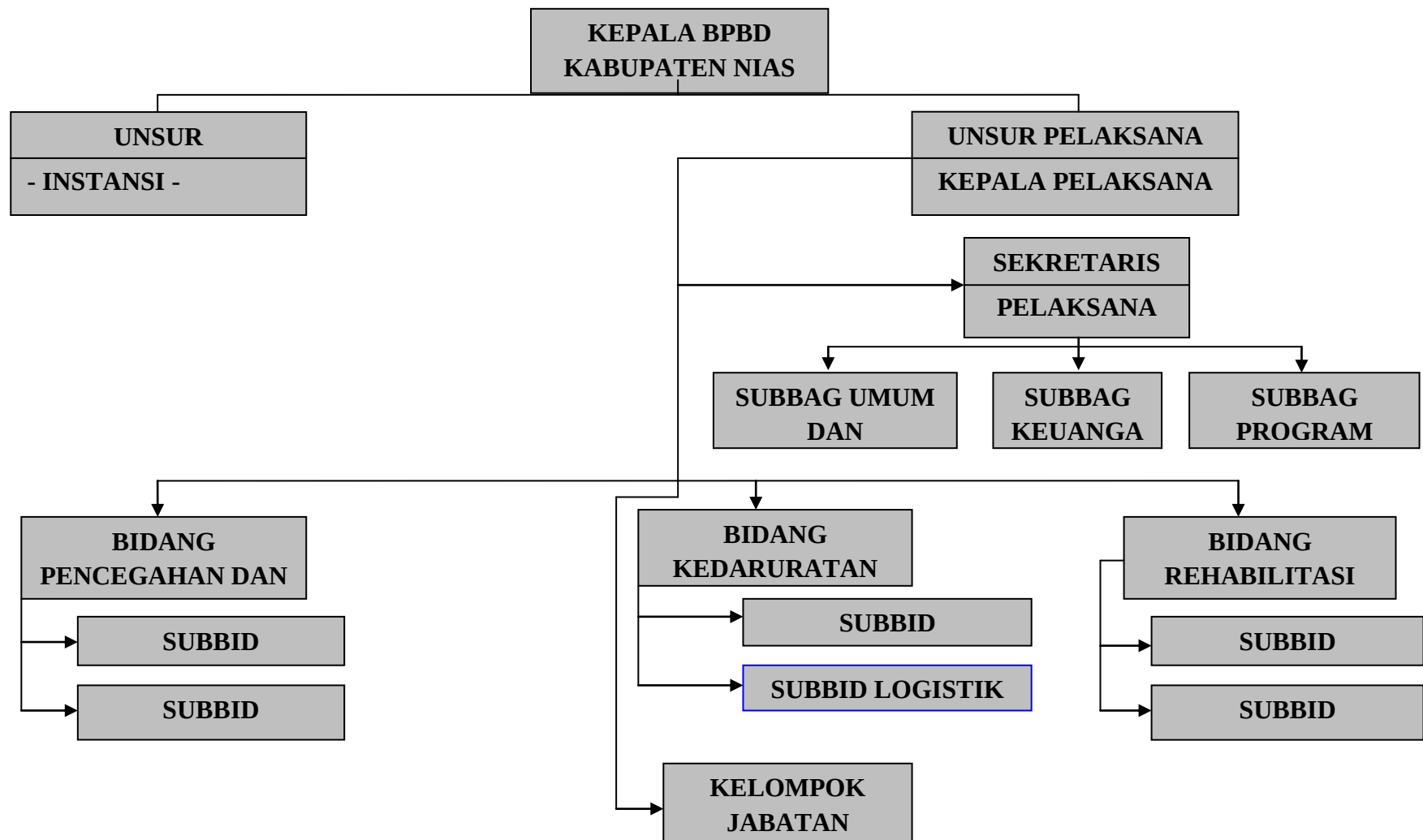
1. Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
 - a. Unsur Pengarah
 - b. Unsur Pelaksana

- c. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Tata Usaha
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
 - d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pencegahan
 - 2) Sub Bidang Kesiapsiagaan
 - e. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Logistik
 - 2) Analis Kebencanaan Ahli Muda/Sub Koordinator Kedaruratan
 - f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Rehabilitasi
 - 2) Sub Bidang Rekonstruksi
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Satuan Tugas
2. Bagan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagaimana tercantum pada lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.
 3. Organisasi dan Uraian Tugas Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 4. Uraian Tugas Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Pembentukan Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Gambar 4.1

**STRUKTUR ORGANISASI BPBD
KABUPATEN NIAS UTARA**



4.2 Analisa dan Hasil Pembahasan

4.2.1 Hasil Pengamatan

Hasil pengamatan yang dilakukan pada lokasi penelitian sangat dibutuhkan dalam mendukung dan menyempurnakan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini difokuskan pada fenomena yang terjadi sesuai dengan variabel penelitian sehingga datanya lebih bermanfaat dan berguna terhadap penelitian. Adapun hasil pengamatan yang telah didapatkan dari lokasi penelitian yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu: kurangnya prasarana yang digunakan oleh pegawai pada saat melakukan operasi, kurangnya pemeliharaan pada alat-alat yang digunakan serta masih terdapat kelalaian pegawai dalam menggunakan alat pelindung diri pada saat melakukan kegiatan operasi.

4.2.2 Hasil Wawancara

Berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya untuk disampaikan kepada responden pada lokasi penelitian, dapat diperoleh data dan informasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Utara, sebagai berikut:

1. Ketersediaan Pelindung Kerja

Ketersediaan pelindung kerja atau alat pelindung diri pada saat kerja sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan kerja pegawai atau menghindari dari terjadinya insiden yang berkaitan langsung dengan jiwa pegawai. Fasilitas yang diharapkan berupa alat pelindung tubuh dan peralatan pencegah terjadinya kecelakaan. Banyak perusahaan yang mengabaikan kelengkapan fasilitas keselamatan atau menganggap suatu hal yang tidak terlalu dibutuhkan, sementara kecelakaan dan penyakit akibat kerja

tidak dapat diketahui kapan akan terjadi sehingga memberikan dampak negative bagi pekerja dan juga memberikan kerugian bagi perusahaan atau organisasi. Wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Yasokhi Hulu, S.E. (Pelaksana BPBD Kabupaten Nias Utara), mengatakan *“BPBD Kabupaten Nias Utara dalam menanggulangi bencana yang terjadi di daerah belum memiliki pelindung kerja bagi pegawai pada saat melakukan kegiatan penanganan bencana, hal ini terjadi karena BPBD Nias Utara masih baru terbentuk dan segala kebutuhan di dalamnya masih tahap perencanaan atau pengusulan”*. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelindung kerja bagi pegawai pada saat melaksanakan penanganan bencana tidak tersedia. Selanjutnya pertanyaan yang sama disampaikan kepada Bapak Yoniari Nazara, SKM. (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan) mengatakan hal sama bahwa *”Pelindung kerja pada saat penanggulangan bencana di Kabupaten Nias Utara belum tersedia”*. Mengingat hasil wawancara dari kedua pimpinan di BPBD Kabupaten Nias menemukan titik terang terkait ketersediaan pelindung kerja yaitu belum adanya pelindung kerja bagi pegawai pada saat penanggulangan bencana. Pertanyaan yang sama juga disampaikan kepada salah satu Pegawai Honorer (THL) yang turut langsung melakukan penanganan bencana sekaligus operator komputer atas nama Feberieli Zega, S.E., mengatakan *“Kalau pelindung diri yang digunakan pada saat melakukan tindakan penanganan bencana memang belum tersedia bagi pegawai, baik itu jaket, topi, sepatu dan alat pelindung diri lainnya. Namun pada saat melakukan tindakan, kami petugas yang turun di lapangan berusaha mempersiapkan diri sendiri dengan alat seadanya dengan memakai jaket dan sepatu kerja”*. Dari pernyataan tersebut di

atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan pelindung kerja bagi pegawai yang melaksanakan tindakan penanganan bencana belum tersedia.

2. Ketersediaan Alat-alat yang digunakan

Alat-alat yang digunakan pada saat melakukan tindakan penanganan bencana sangat membantu para pegawai dalam bertindak serta mempercepat penanganan bencana. Wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Yasokhi Hulu, S.E. (Pelaksana BPBD Kabupaten Nias Utara), mengatakan *“Pada instansi BPBD Kabupaten Nias Utara masih belum banyak peralatan yang digunakan dalam menunjang operasi penanggulangan bencana alam, peralatan yang ada cuma beberapa item saja seperti satu (1) perahu karet, dua (2) perahu viber, 1 (satu) unit mobil pick up dan beberapa tenda yang masih layak untuk digunakan serta 1 (satu) unit pompa air”*. Lebih lanjut pertanyaan yang sama disampaikan kepada Delima Larosa, S.E. (bagian pengadmittirasi sarana dan prasarana) beliau mengatakan *”peralatan yang dimiliki BPBD Kabupaten Nias Utara dalam menunjang kegiatan operasi penanganan bencanamasih sangat terbatas, alat yang dimiliki cuma beberapa item saja”*. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa alat-alat yang digunakan dalam menunjang operasi penanganan bencana di BPBD Kabupaten Nias Utara masih sangat terbatas sehingga penanganan yang dilakukan pun apa adanya saja.

3. Kelayakan alat-alat yang digunakan

Kelayakan alat-alat yang digunakan pada saat melakukan tindakan operasi penanggulangan bencana sangat berpengaruh terhadap keselamatan para petugas. Wawancara

yang dilakukan peneliti kepada Bapak Yasokhi Hulu, S.E. (Pelaksana BPBD Kabupaten Nias Utara), mengatakan *“Alat-alat yang masih tersedia dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasi penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Nias Utara masih dikatakan baik sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat rusaknya alat-alat yang masih tersedia sangat sedikit”* Selanjutnya pertanyaan yang sama juga disampaikan kepada Delima Larosa, S.E. (bagian pengadministrasi sarana dan prasarana) beliau mengatakan, *“alat-alat penunjang pelaksanaan penanggulangan bencana yang digunakan pada BPBD Kabupaten Nias Utara masih cukup layak”*. Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa alat-alat yang digunakan dalam kegiatan operasi penanggulangan bencana cukup layak untuk digunakan.

4. Kenyamanan penggunaan pelindung kerja
Kenyamanan dalam menggunakan pelindung kerja sangat mendukung pegawai dalam melaksanakan kerjanya. Wawancara yang dilakukan kepada Feberieli Zega, S.E (Operator Komputer sekaligus terlibat dalam penanganan bencana di Kabupaten Nias Utara, mengatakan *“yah kalau untuk kenyamanan sih saya tidak bisa berkomentar karena alat pelindung kerja belum tersedia di BPBD Kabupaten Nias Utara”*. Lebih lanjut pertanyaan yang sama juga disampaikan kepada Jenis Bestar Onimar Gea, S.E., (Operator Komputer sekaligus terlibat dalam penanganan bencana yang terjadi di Wilayah Kabupaten Nias Utara, mengatakan *“bagaimana bilang nyaman, alat pelindung diri yang tersedia di BPBD Kabupaten Nias Utara, alat pelindung diri yang kami gunakan selama ini kami siapkan sendiri, seperti Jaket, Topi dan sepatu”* Berdasarkan hasil

wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan dan memenuhi harapan peneliti bahwa karena alat pelindung kerja belum tersedia maka pegawai yang melaksanakan tindakan tidak merasa nyaman.

5. Jaminan Kesehatan bagi petugas

Kesejahteraan bagi seluruh pekerja sangat diharapkan dapat terpenuhi dengan baik, terutama jaminan keselamatan dan kesehatan jiwa pekerja, dimana dapat menunjang kinerja yang baik tanpa adanya rasa takut bagi pekerja untuk melaksanakan tugasnya karna tidak mau menerima resiko. Dalam undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja yang saat ini telah diubah menjadi sistem jaminan sosial nasional undang-undang nomor 40 tahun 2004 yang mengatur jaminan sosial tenaga kerja salah satunya adalah jaminan kecelakaan kerja. Dengan adanya peraturan pemerintah tentang jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, maka perusahaan wajib memberikan jaminan tersebut yang merupakan hak para pekerja. Seperti juga halnya pada BPBD Kabupaten Nias Utara yang disampaikan oleh Bapak Yasokhi Hulu, S.E. (Pelaksana BPBD Kabupaten Nias Utara), mengatakan, *“Kalau untuk jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pegawai di lingkungan BPBD Kabupaten Nias Utara tidak sama, disini ada pegawai negeri sipil dan tenaga harian lepas atau honorer, untuk pegawai negeri sipil mereka mendapat jaminan keselamatan melalui Taspen dan untuk kesehatan mereka ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan sementara tenaga harian lepas atau honorer mereka tidak mendapat santunan atau jaminan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, hanya saja kalau misalnya terjadi kecelakaan pada saat melaksanakan tindakan maka sebagai insan sosial kita tetap*

berpartisipasi untuk itu, untungnya selama ini kecelakaan kerja belum pernah terjadi". Selanjutnya wawancara dilakukan kepada salah satu tenaga harian lepas atau honorer atas nama Feberieli Zega, S.E., mengatakan *"untuk jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga harian lepas tidak ada".* Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan keselamatan dan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil telah ditanggung oleh Negara, sementara untuk tenaga harian lepas atau honorer tidak ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

6. Pengawasan pada saat melaksanakan tindakan

Pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan dan menggunakan wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara struktural yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Pengawasan sangat penting dalam sebuah organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yasokhi Hulu, S.E. (Pelaksana BPBD Kabupaten Nias Utara), beliau mengatakan, *"pengawasan yang dilakukan pada saat melakukan tindakan penanggulangan bencana di wilayah kerja Kabupaten Nias Utara sudah cukup baik dan terkoordinasi, seringkali malah jika terjadi bencana alam seperti banjir di wilayah Kabupaten Nias Utara juga turut hadir, mengawasi sekaligus memberikan bantuan kepada korban bencana alam oleh Bapak Bupati Nias Utara".* Selanjutnya pertanyaan yang sama juga disampaikan kepada salah satu tenaga harian lepas atau honorer yang juga ikut dalam operasi penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Nias Utara, atas nama Jenis Bestar Onimar Gea, S.E., ianya mengatakan

“pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan pada saat melaksanakan tindakan penanggulangan bencana di wilayah kerja Kabupaten Nias Utara terlaksana dengan baik”. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam melaksanakan tindakan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Nias Utara sudah cukup baik.

7. Pelatihan bagi pegawai

Pelatihan sangat erat kaitannya dengan keahlian dan kemampuan kerja para pegawai pada setiap organisasi atau perusahaan. Pelatihan juga dirasa sangat penting dilaksanakan guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja serta inovasi bagi para tenaga untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Yasokhi Hulu, S.E. (Pelaksana BPBD Kabupaten Nias Utara), mengatakan, *“pelatihan bagi pegawai memang sering dilakukan namun khusus untuk pelatihan penanggulangan bencana di Tahun Anggaran 2023 ini belum dilaksanakan”*. Pertanyaan yang sama juga disampaikan kepada salah satu tenaga harian lepas atau honorer yang juga ikut dalam operasi penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Nias Utara, atas nama Jenis Bestar Onimar Gea, S.E., ianya mengatakan *“pelatihan khusus penanggulangan bencana belum pernah dilakukan pelatihan khusus”*. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelatihan bagi pegawai yang melaksanakan operasi penanggulangan bencana belum pernah dilakukan.

8. Pemeliharaan alat-alat yang digunakan

Alat yang digunakan saat melakukan operasi perlu disimpan di tempat yang lebih nyaman guna menjaga kualitas dan tetap dalam kondisi baik, hal ini bertujuan agar pada saat digunakan kembali alat-alat tersebut dapat berfungsi dengan baik. Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Delima Larosa, S.E. (bagian pengadministrasi sarana dan prasarana) beliau mengatakan *“alat-alat yang digunakan untuk kegiatan operasi penanggulangan bencana telah disimpan dengan aman di tempat penyimpanan barang-barang kebutuhan operasi”*. Hal senada juga disampaikan oleh salah satu tenaga harian lepas atau honorer atas nama Feberieli Zega, S.E., berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa alat-alat yang digunakan dalam operasi penanggulangan bencana disimpan ditempat yang aman.

9. Kendala selama melaksanakan tindakan

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Yasokhi Hulu, S.E. (Pelaksana BPBD Kabupaten Nias Utara), mengatakan *“kendala dalam melaksanakan tindakan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Nias Utara sangat banyak, diantaranya: kurangnya alat-alat penunjang operasi, keterbatasan jumlah personil, medan rawan bencana seperti banjir banyak terdapat di wilayah Kabupaten Nias Utara serta kurangnya anggaran sehingga vasilitas yang digunakan tidak mencukupi”*. Pertanyaan yang sama juga disampaikan kepada salah satu tenaga harian lepas atau honorer atas nama Feberieli Zega, S.E, ianya mengatakan *“kendala dalam melaksanakan operasi penanggulangan bencana yaitu kurangnya peralatan yang digunakan serta medan yang susah terjangkau karena banyak terdapat daerah yang sering terjadi bencana alam seperti banjir”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu kendala dalam melaksanakan tindakan operasi sangat banyak.

10. Saran terkait kendala yang dihadapi

Hasil wawancara dengan Bapak Yasokhi Hulu, S.E. (Pelaksana BPBD Kabupaten Nias Utara), mengatakan bahwa *“Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nias Utara telah mengajukan proposal peralatan penanggulangan bencana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2023 ini seperti mobil, dapur umum, tenda pengungsi, tenda rumah tangga, perahu karet dan kebutuhan lainnya ketika bencana terjadi, namun peralatan penanggulangan bencana yang sudah diajukan tersebut belum dipastikan realisasinya menunggu jawaban dari BNPB Pusat mengingat peralatan tersebut dibutuhkan oleh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, Kabupaten Nias Utara tidak dapat melakukan pengadaan peralatan penanggulangan bencana itu dikarenakan keterbatasan APBD Kabupaten Nias Utara, kemudian perlu adanya pelatihan bagi pegawai yang ikut terlibat dalam operasi penanggulangan bencana sehingga lebih terampil dan mampu menangani bencana dengan tepat”*.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa saran terkait kendala yang dihadapi oleh pegawai pada saat melaksanakan tindakan operasi yaitu melengkapi fasilitas yang digunakan sehingga pegawai merasa nyaman dan mampu bekerja dengan baik.

4.2.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil observasi dan hasil wawancara diperoleh hasil penelitian tentang peranan keselamatan dan

kesehatan kerja pada BPBD Kabupaten Nias Utara, sebagai berikut:

1. BPBD Kabupaten Nias Utara belum menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitas seperti pelindung kerja yang belum tersedia bagi pegawai yang melaksanakan operasi penanggulangan bencana serta alat-alat yang digunakan yang masih terbatas.
2. BPBD Kabupaten Nias Utara tidak menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga harian lepas atau honorer kecuali para Aparatur Sipil Negara yang telah ditanggung oleh pemerintah.
3. Alat-alat yang tersedia dengan kapasitas yang terbatas masih layak untuk digunakan dan tetap disimpan dengan aman pada tempat yang telah disiapkan.
4. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan sudah terlaksana dengan baik namun peningkatan kualitas kerja pegawai melalui pelatihan khusus penanggulangan bencana belum terlaksana.
5. Kendala yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Nias Utara dalam melaksanakan tindakan operasi penanggulangan bencana di Wilayah Kabupaten Nias Utara antara lain: tidak adanya pelindung kerja, kurangnya fasilitas yang digunakan, kurangnya personel yang tersedia, tidak ada anggaran dari APBD. Untuk menyikapi hal tersebut di atas BPBD Kabupaten Nias Utara telah menyampaikan proposal kepada BNPB Pusat guna melengkapi fasilitas yang ada.

4.2.3 Pembahasan

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya adalah suatu keharusan kepada organisasi atau perusahaan yang mana fungsinya dapat melindungi dan

menjaga para pekerja di lapangan (proyek) dari berbagai macam kecelakaan kerja yang tanpa disadari oleh pekerja. Oleh karena itu penerapannya sangat penting ditambah lagi dengan situasi yang cukup berbahaya dan mengancam nyawa para pekerja, seperti halnya dalam penanganan bencana alam.

Selanjutnya keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan upaya perlindungan para pekerja dan orang lain yang berada di lokasi kerja terhadap bahaya dari kecelakaan kerja, tujuannya adalah mencegah, mengurangi atau menghilangkan resiko akibat penyakit dan kecelakaan kerja. Serta mengangkat derajat kesehatan para pekerja sehingga produktivitas pekerja terus meningkat meskipun ditengah situasi yang cukup ekstrim, dimana pada undang-undang Republik Indonesia dijelaskan bahwa nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu upaya kesehatan kerja ditunjukkan untuk melindungi para pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan sehingga sudah seharusnya pihak instansi atau perusahaan menerapkan upaya-upaya K3 ditempat bekerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan perlindungan kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang berkaitan dengan pekerjaan. Sedangkan kesehatan merujuk kepada kondisi umum fisik, mental, stabilitas dan emosi secara umum (Kartikasari 2017). Keselamatan dan kesehatan kerja juga adalah alat penting yang memproteksi pekerja instansi atau perusahaan, lingkungan hidup, masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh instansi atau perusahaan.

Kecelakaan dan penyakit akibat kerja merupakan resiko yang menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh setiap pekerja. Penyebab terjadinya kecelakaan yang mengancam nyawa para pekerja disebabkan karena kurangnya dukungan peralatan yang maksimal yang dibutuhkan oleh pekerja selama melakukan kegiatan operasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada BPBD Kabupaten Nias Utara dapat disimpulkan bahwa peralatan yang digunakan masih jauh dari apa yang diharapkan seperti tidak tersedianya alat pelindung kerja yang mengakibatkan pekerja dapat mengalami kecelakaan dan bahkan rentan dengan penyakit akibat situasi atau faktor cuaca yang dihadapi di lapangan, terlebih petugas juga mendapat tekanan dari lingkungan sekitar lokasi penanganan bencana untuk ekstra dalam beroperasi. Selain itu peralatan dalam melaksanakan kegiatan operasi sangat terbatas, hal ini menyebabkan terlambatnya penanganan yang dilakukan serta resiko kecelakaan bagi pegawai cukup tinggi. Kondisi ini harusnya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nias Utara pada khususnya karena dari hasil analisa dan pengalaman bahwa wilayah Kabupaten Nias Utara rentan dengan bencana alam khususnya banjir sehingga para pegawai yang melaksanakan penanganan merasa aman dan nyaman. Hal ini didukung oleh teori Suwardi dan Daryanto(2018) “Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yaitu suatu upaya dalam mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan antara Keselamatan dengan Kesehatan”

Upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Nias Utara untuk menjaga kualitas alat yang digunakan dalam penanganan bencana alam sudah cukup baik yakni di

simpan di suatu gudang yang telah tersedia di BPBD Kabupaten Nias Utara, namun dari hasil pengamatan dapat dikatakan bahwa peralatan yang telah disimpan di tempat yang aman tersebut, tidak dilakukan pemeliharaan atau pengecekan terus menerus sehingga pada saat melakukan kegiatan operasi terkadang tidak berfungsi akibat kurangnya pemeliharaan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan teori (Ansori & Mustajib, 2014) “kegiatan pemeliharaan merupakan seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan mesin dan peralatan pada kondisi operasional dan aman, serta apabila terjadi kerusakan dapat dikendalikan”

Setiap instansi diwajibkan menjamin pelayanan dan pembiayaan kesehatan para pekerja sebagai upaya membantu para pekerja dalam pembiayaan pengobatan pekerja serta jaminan sosial. Berdasarkan hasil observasi dan hasil penelitian menunjukkan bahwa para pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan BPBD Kabupaten Nias Utara telah bertanggung segala pembiayaan kesehatan juga jaminan sosialnya, namun para pegawai yang masih berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer, tidak bertanggung jaminan sosialnya dan untuk pembiayaan pengobatan akibat resiko kerja ditanggung oleh BPBD Kabupaten Nias Utara.

Keadaan terkait jaminan kesehatan dan keselamatan kerja di BPBD Kabupaten Nias Utara memang dinilai kurang baik, namun hal ini terjadi karena tidak tersedianya anggaran bagi pegawai yang berstatus non PNS. Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja sebenarnya sangat penting diberikan kepada pekerja sebagai bentuk kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta memberikan rasa nyaman dalam

melakukan kegiatannya juga keluarga yang ditinggalkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan menurut Banyuwangi et al dalam Buku Lating (2021) “penerapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu upaya untuk membuat tempat kerja yang nyaman,sehat serta terhindar dari adanya pencemaran lingkungan,yang dapat mengurangi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang akhirnya membuat peningkatan keefktifan dan produktifitas kerja”. Pentingnya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja juga didukung oleh penelitian Said J, Muhammad, dkk. (2023) dalam Jurnalnya dengan judul “Analisis Jaminan Sosial Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan pada PT. Indah Logistik Cargo Cabang Mamuju” menyimpulkan bahwa jaminan sosial kesehatan dan keselamatan kerja karyawan sangat penting guna memberikan rasa nyaman bagi pekerja.

Upaya pengawasan yang dilakukan BPBD Kabupaten Nias Utara agar pelaksanaan penanganan bisa berjalan dengan baik meskipun dengan dengan alat seadanya sudah berjalan dengan baik, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kegiatan penanganan bencana yang dilakukan para pegawai sudah berjalan dengan baik. Kegiatan pengawasan ini selain dilakukan oleh pimpinan BPBD Kabupaten Nias Utara sendiri juga para pegawai ikut serta dalam pengawasan pelaksanaanya. Kondisi lain yang cukup menjadi perhatian adalah tidak adanya pelatihan yang diberikan kepada pegawai dalam penanganan bencana, sementara kegiatan pelatihan ini sangat membantu para pegawai untuk melaksanakan kegiatannya dengan cepat dan tepat serta terhindar dari resiko kerja yang merugikan para pegawai itu sendiri. Hal

ini sejalan dengan teori Chan dalam (Priansa, 2017) menyatakan bahwa “pelatihan merupakan pembelajaran yang disediakan untuk meningkatkan kinerja berkaitan dengan pekerjaan saat ini. Ada dua implikasi dalam pengertian tersebut. Pertama, kinerja saat ini perlu ditingkatkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan kemampuan pegawai saat ini, dengan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan saat ini. Kedua, mempelajari bukan untuk memenuhi kebutuhan masa depan, melainkan untuk dimanfaatkan dengan segera”.

Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada BPBD Kabupaten Nias Utara merupakan program yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Program ini sebagai bentuk upaya dalam melindungi pegawai juga asset atau peralatan yang dimiliki oleh instansi dari hal-hal yang merugikan para pegawai yang melaksanakan tindakan penanganan bencana. Namun program ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak didukung oleh berbagai pihak. Dari hasil pengamatan dan penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yakni: kurangnya peralatan, personil juga biaya yang dibutuhkan oleh BPBD Kabupaten Nias Utara. Sejauh ini dalam memenuhi segala kekurangan yang ada, BPBD Kabupaten Nias Utara sudah menyampaikan proposal kepada BNPB untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan lain yang dibutuhkan pada saat melaksanakan penanggulangan bencana. Sementara peran Pemerintah Daerah dalam mendukung pembiayaan kebutuhan kelengkapan masih belum ada, mengingat APBD yang masih minim serta daerah dengan kategori terpencil.

Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi pekerja dalam melaksanakan tugasnya yaitu lingkungan kerja. BPBD Kabupaten Nias Utara dalam memenuhi lingkungan kerja yang baik masih belum sempurna, hal ini dapat dilihat dari Ruangan Kantor yang digunakan masih menggunakan bekas Kantor Camat Lotu sehingga dari sisi fasilitas kantor yang digunakan dapat dikatakan masih kurang, hal lain yaitu dinding kantor yang digunakan masih ada yang menggunakan papan. Kondisi lain yang menjadi perhatian yaitu debu, kebisingan dan getaran. BPBD Kabupaten Nias Utara berada tepat di Titik Nol (0) Kabupaten Nias Utara dan dipersimpangan jalan, hal ini jelas rentan dengan kebisingan dan debu serta getaran kendaraan yang lalu lintas di jalan, kondisi ini jelas mengganggu ketenangan pegawai dalam bekerja sehingga kinerja pun tidak maksimal. Lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Pentingnya lingkungan kerja yang aman didukung oleh faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi produktivitas kerja menurut Sedarmayanti dalam Isni Purwati (2016;33), yaitu:

a. Penerangan/cahaya di tempat kerja

Penerangan sangat bermanfaat bagi keselamatan dan kelancaran kerja. Oleh karena itu perlu perhatian adanya penerangan yang terang tetapi tidak menyilaukan.

b. Temperatur di tempat kerja

Tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan normal dengan sistem tubuh yang baik sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi diluar tubuh. Tetapi

kemampuan untuk menyesuaikan diri tersebut ada batasnya, yaitu bahwa tubuh manusia dapat menyesuaikan dirinya dengan temperature luar berkisar untuk kondisi panas dan untuk kondisi dingin, dari keadaan normal tubuh. Namun sebenarnya keadaan tersebut tidak mutlak berlaku bagi setiap pegawai karena kemampuan beradaptasi tiap pegawai berbeda, tergantung di daerah bagaimana pegawai dapat hidup.

c. Kebisingan di tempat kerja

Kebisingan merupakan bunyi yang tidak diinginkan oleh telinga. Bunyi tersebut dapat mengganggu ketenangan pekerja, merusak pendengaran dan menimbulkan kesalahan komunikasi. Maka suara bising harusnya dihindari agar produktivitas kerja dapat dilakukan dengan baik dan lancar

d. Tata warna di tempat kerja

Menata warna di tempat kerja perlu diperhatikan . warna mempunyai pengaruh besar terhadap perasaan, seperti rasa senang, sedih dan lain sebagainya, karena dalam warna dapat merangsang perasaan manusia

e. Keamanan di tempat kerja

Guna menjaga lingkungan kerja tetap aman, maka perlu adanya satuan petugas keamanan (SATPAM)

f. Kebersihan

Kondisi dimana lingkungan kerja dalam terjaga kebersihannya, ruang yang bersih akan membuat suasana menjadi lebih indah sehingga karyawan akan menjadi lebih semangat dalam menyelesaikan tugasny